

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Deskripsi Teoritis

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *implementation*, yang berarti pelaksanaan, penerapan, atau perwujudan rencana menjadi tindakan nyata. Implementasi merupakan tahap setelah suatu kebijakan, program, atau perencanaan disusun sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk aktivitas yang nyata. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) mendefinisikan implementasi kurikulum sebagai upaya menerapkan kerangka dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan ke dalam proses pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan konteks sekolah dan karakteristik peserta didik.

Menurut Usman (2021) dalam penyempurnaan bukunya, implementasi adalah serangkaian aktivitas terencana yang dilakukan untuk mengubah rencana menjadi kenyataan, melibatkan pengaturan sumber daya, metode, dan langkah kerja agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Implementasi bukan hanya sekadar menjalankan suatu kegiatan, tetapi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Sementara itu, Mulyasa (2022) menjelaskan bahwa implementasi dalam bidang pendidikan merupakan penerapan berbagai komponen pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya—mulai dari tujuan, materi, metode, media, hingga penilaian sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Implementasi mencakup kesatuan kegiatan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, hingga evaluasi yang komprehensif untuk memastikan perubahan yang diinginkan terjadi pada peserta didik. Widodo & Juwita (2025) menambahkan bahwa dalam konteks penanaman nilai, implementasi berarti proses memindahkan nilai dari ranah pemahaman ke ranah penghayatan dan perilaku nyata sehari-hari.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi mengacu pada penerapan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran PKN sehingga nilai tersebut dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

b. Tujuan Implementasi

Daryanto & Darmawan (2023) menyatakan bahwa tanpa implementasi yang tepat, dokumen kurikulum atau rencana pembelajaran tidak akan memiliki makna praktis bagi perkembangan peserta didik. Secara umum, tujuan implementasi meliputi beberapa aspek berikut:

1) Mewujudkan tujuan yang telah direncanakan

Implementasi dilakukan agar setiap rencana pembelajaran dapat diterapkan secara nyata sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Hal ini selaras dengan pendapat Sanjaya (2024) yang mengemukakan bahwa kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan menjadi syarat utama agar potensi peserta didik dapat berkembang sesuai harapan.

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran

Implementasi membantu guru melaksanakan pembelajaran secara sistematis melalui penggunaan metode, media, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hamalik (2021) menjelaskan bahwa proses yang terencana dan terarah akan menciptakan suasana belajar yang efektif, menyenangkan, serta mendorong partisipasi aktif peserta didik.

3) Menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik

Dalam pembelajaran PKN, implementasi diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleran, dan cinta tanah air. Latif dkk. (2025) menegaskan bahwa tujuan khusus implementasi PKN adalah menjadikan nilai-nilai luhur bangsa sebagai pedoman perilaku peserta didik dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan.

4) Meningkatkan kualitas pendidikan

Implementasi yang dilaksanakan secara konsisten akan meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi akademik dan karakter yang baik. Suryadi (2023) menambahkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya terlihat dari capaian akademik, tetapi juga dari kematangan moral dan sosial peserta didik sebagai warga negara.

c. Tahapan Implementasi

Pelaksanaan implementasi dalam pembelajaran tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemendikbudristek (2023) dalam panduan pelaksanaan Kurikulum Merdeka menjelaskan bahwa tahapan implementasi yang terstruktur membantu guru dalam mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran secara utuh.

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dan fondasi utama implementasi yang meliputi penyusunan tujuan pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, pemilihan metode, media pembelajaran, serta penentuan bentuk evaluasi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru harus

merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam setiap aktivitas belajar, baik pada penyampaian materi maupun pada tugas yang diberikan. Trianto (2022) menekankan bahwa perencanaan yang matang dengan muatan nilai yang jelas akan memudahkan guru dalam menanamkan sikap positif kepada peserta didik.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan proses penerapan seluruh rencana yang telah disusun. Pada tahap ini guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar atau perangkat pembelajaran yang telah disiapkan. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan keteladanan, membiasakan perilaku positif, memfasilitasi diskusi yang mendalam, serta membimbing peserta didik agar mampu menghubungkan materi dengan pengalaman nyata dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Zubaedi (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran karakter memerlukan keterlibatan emosional dan keteladanan guru yang nyata, bukan sekadar penyampaian konsep secara lisan.

3) Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi yang telah dilakukan serta hambatan yang ditemui. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan berkelanjutan terhadap sikap, perilaku, partisipasi, serta perkembangan karakter peserta

didik selama proses pembelajaran, serta analisis hasil karya dan refleksi peserta didik. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Arikunto (2021) menambahkan bahwa evaluasi implementasi nilai moral harus menggunakan instrumen yang beragam, tidak hanya tes tertulis, tetapi juga lembar pengamatan, catatan anekdot, dan penilaian diri peserta didik.

Ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan berulang sehingga implementasi dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, dan semakin baik dari waktu ke waktu.

d. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar lingkungan sekolah. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan merupakan hasil interaksi berbagai faktor pendukung yang berjalan selaras.

1) Guru

Guru merupakan faktor utama dan penentu keberhasilan dalam implementasi pembelajaran karena berperan sebagai pendidik, fasilitator, motivator, pembimbing, sekaligus teladan bagi peserta didik. Kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru akan sangat menentukan keberhasilan penanaman nilai-nilai

moral. Suprijanto (2025) menegaskan bahwa guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai karakter dan kemampuan mengintegrasikannya dalam pembelajaran akan jauh lebih berhasil dalam membentuk sikap positif peserta didik dibandingkan guru yang hanya berfokus pada penyampaian materi.

2) Peserta Didik

Karakteristik peserta didik, seperti motivasi belajar, kemampuan memahami dan merenungkan nilai, latar belakang keluarga, kesiapan mengikuti pembelajaran, serta tahap perkembangan moral dan emosional turut memengaruhi keberhasilan implementasi nilai-nilai moral. Santrock dalam Desmita (2023) menjelaskan bahwa peserta didik pada usia remaja memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan berpikir kritis dan kebutuhan akan pengakuan diri agar nilai yang diajarkan dapat diterima dan diinternalisasi.

3) Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang kondusif, budaya sekolah yang positif, kedisiplinan warga sekolah, dukungan kepala sekolah, serta adanya kesepakatan bersama dalam menerapkan aturan dan nilai akan membantu pelaksanaan implementasi nilai-nilai moral secara optimal. Sumaatmadja (2022) menyatakan bahwa budaya sekolah yang menghargai kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab menjadi pendukung utama pembentukan karakter peserta didik.

4) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan ruang belajar yang nyaman, media pembelajaran yang relevan, teknologi pembelajaran yang memadai, serta fasilitas sekolah yang mendukung kegiatan pengembangan karakter akan mendukung efektivitas proses pembelajaran. Arsyad (2024) menjelaskan bahwa sarana yang tepat membantu guru menyajikan nilai secara lebih nyata, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik.

5) Dukungan Orang Tua dan Masyarakat

Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga harus selaras dengan nilai yang diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara guru dan orang tua serta kesepahaman dengan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Gunawan (2023) menambahkan bahwa kesenjangan nilai antara sekolah dan lingkungan rumah seringkali menjadi hambatan utama dalam pembentukan karakter yang konsisten.

2. Nilai-Nilai Moral

a. Pengertian Nilai Moral

Menurut Fraenkel dalam Adisusilo (2022), nilai adalah suatu gagasan atau konsep mengenai sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang sehingga menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sementara itu, Rokeach dalam Suryana dkk. (2023) menyatakan bahwa

nilai merupakan keyakinan yang bersifat menetap mengenai suatu cara bertindak atau tujuan hidup yang dianggap lebih baik dibandingkan alternatif lainnya.

Moral merupakan aturan atau pedoman mengenai baik dan buruk yang menjadi dasar perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Moral berkaitan dengan sikap, tindakan, serta tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Dalam dunia pendidikan, moral menjadi salah satu aspek yang harus dikembangkan agar peserta didik mampu berperilaku sesuai dengan norma agama, norma sosial, norma hukum, dan nilai-nilai Pancasila (Latif dkk., 2025). Desmita (2023) menambahkan bahwa perkembangan moral pada masa remaja sangat menentukan arah kehidupan seseorang di masa depan, sehingga memerlukan bimbingan yang tepat dan berkelanjutan.

Nilai-nilai moral dalam pendidikan merupakan nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan di lingkungan sekolah. Penanaman nilai moral bertujuan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, berintegritas, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain. Dalam proses pendidikan, nilai-nilai moral tidak hanya diajarkan melalui materi pelajaran, tetapi juga melalui keteladanan guru, budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta interaksi sosial di lingkungan sekolah. Guru berperan sebagai teladan dalam menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral sehingga peserta didik

dapat mencontoh dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Suprijanto, 2025). Widodo & Juwita (2025) menegaskan bahwa keteladanan guru memiliki pengaruh jauh lebih besar dibandingkan sekadar penjelasan lisan mengenai nilai moral.

Beberapa nilai moral yang perlu dikembangkan dalam pendidikan antara lain:

- 1) Kejujuran, yaitu sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa melakukan kebohongan atau kecurangan. Nilai ini menjadi dasar kepercayaan antarindividu dan fondasi integritas pribadi (Arikunto, 2021).
- 2) Tanggung jawab, yaitu kesediaan melaksanakan tugas dan menerima konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab mencerminkan kedewasaan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Sanjaya, 2024).
- 3) Disiplin, yaitu kepatuhan terhadap aturan, tata tertib, dan kesepakatan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Disiplin merupakan upaya melatih diri untuk bertindak secara teratur dan tidak melanggar ketentuan yang ada (Suryana & Setiawan, 2023).
- 4) Toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan agama, suku, budaya, pendapat, dan latar belakang orang lain. Nilai ini sangat penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman bangsa Indonesia (Latif dkk., 2025).

- 5) Kepedulian, yaitu sikap peka terhadap kebutuhan orang lain serta memiliki keinginan untuk membantu sesama. Kepedulian menumbuhkan sikap empati dan kebersamaan dalam kehidupan sosial (Rohman dkk., 2024).
- 6) Kerja sama, yaitu kemampuan bekerja bersama orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling menghargai dan menghormati. Nilai ini menjadi wujud nyata dari semangat gotong royong yang menjadi ciri khas budaya bangsa (Kemendikbudristek, 2023).
- 7) Sopan santun, yaitu perilaku yang menunjukkan rasa hormat, kesantunan, dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Sopan santun mencerminkan budi pekerti luhur dan penghargaan terhadap martabat orang lain (Gunawan, 2023).

Nilai-nilai tersebut menjadi dasar pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

b. Indikator Nilai-Nilai Moral

Indikator nilai-nilai moral merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Indikator tersebut dapat diamati melalui sikap, perilaku, maupun kebiasaan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran dan berinteraksi di lingkungan sekolah (Arikunto, 2021).

Indikator ini disusun agar penilaian tidak hanya bersifat subjektif, tetapi memiliki acuan yang jelas dan terukur (Zubaedi, 2024).

Beberapa indikator nilai-nilai moral meliputi:

- 1) Berkata jujur dalam setiap keadaan, tidak memalsukan informasi, dan mengakui kesalahan yang diperbuat.
- 2) Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, tidak menunda pekerjaan, dan berani menanggung akibat tindakan sendiri.
- 3) Mematuhi tata tertib dan aturan sekolah, datang tepat waktu, serta menggunakan fasilitas sesuai ketentuan.
- 4) Menghargai pendapat, keyakinan, dan perbedaan orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta menghindari sikap merendahkan orang lain.
- 5) Menunjukkan sikap peduli terhadap teman, guru, dan lingkungan sekolah, misalnya menolong teman yang kesulitan dan ikut menjaga kebersihan.
- 6) Mampu bekerja sama dalam kegiatan kelompok, saling berbagi tugas, dan tidak mendominasi atau menyalahkan orang lain.
- 7) Bersikap sopan dan santun dalam berkomunikasi, menggunakan bahasa yang baik, serta tidak berkata kasar atau menyakitkan hati.
- 8) Menunjukkan rasa hormat kepada guru, orang tua, dan sesama peserta didik melalui sikap dan tutur kata yang tepat.

- 9) Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, serta merawat fasilitas yang ada.
- 10) Bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan, menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan berusaha memperbaiki kesalahan.

Indikator-indikator tersebut dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan implementasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kemendikbudristek, 2023).

c. Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Moral di Sekolah

Sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Selain keluarga, sekolah menjadi tempat peserta didik belajar mengenai nilai, norma, etika, serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai moral harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan (Gunawan, 2023). Sumaatmadja (2022) menegaskan bahwa sekolah berperan sebagai tempat pembentukan kesepahaman nilai yang menjadi landasan kehidupan bersama.

Penanaman nilai-nilai moral di sekolah memiliki berbagai manfaat. Pertama, membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sehingga siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan (Daryanto & Darmawan, 2023). Kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, harmonis, dan saling

menghargai yang mendukung proses belajar mengajar secara efektif (Suryadi, 2023). Ketiga, mencegah munculnya berbagai perilaku menyimpang, seperti perundungan (*bullying*), ketidakjujuran akademik, kekerasan, dan pelanggaran tata tertib sekolah yang makin banyak terjadi di kalangan remaja (Rohman dkk., 2024). Keempat, mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mampu berpartisipasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Latif dkk., 2025).

Dalam implementasinya, penanaman nilai-nilai moral tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi pelajaran, tetapi juga harus diwujudkan melalui keteladanan guru, budaya sekolah, pembiasaan perilaku positif, serta kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai moral tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar menjadi bagian dari karakter peserta didik yang tercermin dalam perilaku sehari-hari (Zubaedi, 2024). Suprijanto (2025) mengingatkan bahwa keselarasan sikap antara guru, orang tua, dan lingkungan sangat menentukan keberhasilan pembentukan karakter yang konsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moral merupakan landasan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Melalui penanaman nilai-nilai moral yang dilakukan secara konsisten dalam proses pendidikan, khususnya melalui pembelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, diharapkan peserta didik mampu berkembang menjadi individu yang berintegritas, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)

a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik, peserta didik, serta berbagai sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), pembelajaran diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Menurut Susanto dalam Sapriya (2023), pembelajaran PKN adalah proses pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan sehingga mampu berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, Winataputra dalam Darmawan & Ladivani (2024) menyatakan bahwa PKN merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, serta

pendidikan karakter yang berlandaskan pada Pancasila dan konstitusi negara.

Sapriya (2022) memperjelas bahwa pembelajaran PKN pada Kurikulum Merdeka tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan materi konstitusi, tetapi lebih menekankan pada pengalaman nyata peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan. Kemendikbudristek (2023) juga mendefinisikan pembelajaran PKN sebagai proses pengembangan kemampuan berpikir kritis, beretika, dan bertindak bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.

Dengan demikian, pembelajaran PKN dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki karakter, moral, dan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

b. Tujuan Pembelajaran PKN

Pembelajaran PKN diselenggarakan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran PKN tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik (Kemendikbudristek, 2022). Secara umum, tujuan pembelajaran PKN meliputi beberapa aspek berikut:

- 1) Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan

Pembelajaran PKN bertujuan membentuk peserta didik agar memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia serta berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman (Latif dkk., 2025).

- 2) Membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila

Melalui pembelajaran PKN, peserta didik diarahkan untuk memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleran, demokratis, dan menghargai keberagaman sebagai landasan perilaku sehari-hari (Zubaedi, 2024).

- 3) Mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara

Peserta didik diharapkan memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sapriya, 2022).

- 4) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan demokratis

Pembelajaran PKN mendorong peserta didik untuk mampu menganalisis berbagai permasalahan sosial secara objektif, menghargai pendapat orang lain, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab melalui musyawarah (Darmawan & Ladivani, 2024).

5) Membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab

Peserta didik diharapkan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif, baik dalam kegiatan sosial, politik, maupun pelestarian nilai budaya bangsa (Suprijanto, 2025).

c. Fungsi dan Ruang Lingkup PKN

Pembelajaran PKN memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional karena menjadi sarana pembentukan karakter sekaligus pengembangan kompetensi kewarganegaraan peserta didik (Sapriya, 2022).

Adapun fungsi pembelajaran PKN antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi pendidikan nilai, yaitu menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kemendikbudristek, 2022).
- 2) Fungsi pendidikan karakter, yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan memiliki kepedulian sosial sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (Zubaedi, 2024).
- 3) Fungsi pendidikan demokrasi, yaitu mengembangkan sikap demokratis, menghargai perbedaan pendapat, serta mampu menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah untuk mufakat (Darmawan & Ladivani, 2024).

- 4) Fungsi pendidikan kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara yang memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam menjaga keutuhan dan kemajuan negara (Latif dkk., 2025).

Ruang lingkup pembelajaran PKN meliputi berbagai materi yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

- 1) Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.
- 3) Hak Asasi Manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia.
- 4) Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip persatuan dalam keberagaman.
- 5) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara.
- 6) Sistem demokrasi Pancasila sebagai wujud kedaulatan rakyat.
- 7) Hak dan kewajiban warga negara serta pelaksanaannya secara seimbang.
- 8) Norma, hukum, dan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 9) Kehidupan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal sebagai kekayaan bangsa (Kemendikbudristek, 2023).

d. Peran Guru PKN dalam Pembentukan Karakter

Guru PKN memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing,

motivator, dan fasilitator dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik (Suprijanto, 2025).

Sebagai pendidik, guru memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila, norma, hukum, serta etika kehidupan bermasyarakat dengan cara yang relevan dan kontekstual (Sapriya, 2022). Sebagai teladan, guru menunjukkan perilaku yang mencerminkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai sehingga menjadi contoh nyata yang ditiru oleh peserta didik (Widodo & Juwita, 2025).

Sebagai motivator, guru mendorong peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari melalui pemberian apresiasi, tantangan kegiatan positif, serta pembiasaan di lingkungan sekolah (Kemendikbudristek, 2023). Sebagai fasilitator, guru menciptakan suasana belajar yang aktif, demokratis, dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat mengembangkan karakter positif secara optimal melalui diskusi, refleksi, dan pengalaman langsung (Darmawan & Ladivani, 2024).

Selain itu, guru PKN juga berperan dalam membangun budaya sekolah yang mendukung pembentukan karakter melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, musyawarah, pembiasaan disiplin, kegiatan sosial, serta pemberian penghargaan terhadap perilaku positif peserta didik (Zubaedi, 2024). Suprijanto (2025) menegaskan bahwa konsistensi guru dalam menjalankan peran-peran tersebut menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter peserta didik.

e. Implementasi Nilai-Nilai Moral dalam Pembelajaran PKN

Implementasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran PKN merupakan proses penerapan nilai-nilai moral ke dalam seluruh kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep moral secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbudristek, 2022).

Implementasi tersebut dimulai dari tahap perencanaan, yaitu guru mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam tujuan pembelajaran, materi, metode, media, serta bentuk penilaian yang digunakan secara terperinci (Trianto, 2022). Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, guru menanamkan nilai-nilai moral melalui penyampaian materi yang relevan, diskusi kelompok, studi kasus nyata di lingkungan sekitar, pembelajaran berbasis proyek, pemberian contoh yang nyata, serta pembiasaan perilaku positif selama proses pembelajaran berlangsung (Darmawan & Ladivani, 2024).

Pada tahap evaluasi, guru melakukan penilaian tidak hanya terhadap aspek pengetahuan peserta didik, tetapi juga terhadap perkembangan sikap, perilaku, dan karakter yang ditunjukkan selama proses pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi berkelanjutan, penilaian sikap, catatan anekdot, jurnal refleksi, maupun penilaian diri peserta didik (Arikunto, 2021).

Beberapa nilai moral yang diimplementasikan dalam pembelajaran PKN antara lain kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerja sama, kepedulian, sikap demokratis, cinta tanah air, serta penghormatan

terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri peserta didik sehingga mampu membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Latif dkk., 2025).

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran PKN merupakan upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, berintegritas, serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Zubaedi, 2024).

4. Penguatan Karakter

a. Pengertian Penguatan Karakter

Penguatan karakter merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk menanamkan, mengembangkan, serta memperkuat nilai-nilai karakter positif pada peserta didik. Penguatan karakter bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai moral secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi kebiasaan yang melekat (Kemendikbudristek, 2023).

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi

olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga dengan melibatkan keluarga serta masyarakat. Gerakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam seluruh proses pendidikan, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Dalam konteks pendidikan, penguatan karakter dilakukan melalui proses pembelajaran yang bermakna, pembiasaan perilaku positif, keteladanan guru, kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi nilai, budaya sekolah yang mendukung, serta kerja sama yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat (Rohman dkk., 2024). Sapriya (2022) menegaskan bahwa penguatan karakter harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai program tambahan yang terpisah dari kegiatan utama sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan karakter dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk mengembangkan nilai-nilai positif sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri peserta didik dan tercermin dalam perilakunya yang konsisten di berbagai situasi.

b. Tujuan Penguatan Karakter

Penguatan karakter memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki kepribadian unggul, berintegritas, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan Pancasila (Latif dkk., 2025).

Secara umum, tujuan penguatan karakter meliputi beberapa aspek berikut:

- 1) Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, yaitu memiliki perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan nilai-nilai Pancasila serta mencerminkan penghormatan terhadap martabat diri sendiri dan orang lain (Kemendikbudristek, 2022).
- 2) Menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik terbiasa bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan menghargai orang lain tanpa perlu pengawasan berlebihan (Zubaedi, 2024).
- 3) Mengembangkan kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga peserta didik mampu mengambil keputusan secara bijaksana, berani menanggung konsekuensi setiap tindakan, serta tidak mudah bergantung pada orang lain (Daryanto & Darmawan, 2023).
- 4) Meningkatkan kepedulian sosial dan semangat kebangsaan, sehingga peserta didik mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk serta berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Suprijanto, 2025).
- 5) Mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memahami hak dan kewajiban secara seimbang serta mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sapriya, 2022).

c. Nilai-Nilai Karakter Peserta Didik

Nilai-nilai karakter merupakan seperangkat nilai positif yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh setiap peserta didik. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membentuk perilaku yang baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat (Adisusilo, 2022).

Berdasarkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), terdapat lima nilai karakter utama yang menjadi prioritas dalam pendidikan di Indonesia, yaitu:

- 1) Religius, yaitu sikap yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi antarumat beragama, perilaku saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, serta kesesuaian perilaku dengan ajaran agama masing-masing.
- 2) Nasionalis, yaitu sikap mencintai tanah air, menghargai keberagaman budaya dan suku bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta memiliki semangat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 3) Mandiri, yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, memiliki etos kerja yang tinggi, tidak mudah bergantung kepada orang lain, serta mampu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara bijaksana berdasarkan pertimbangan yang matang.
- 4) Gotong royong, yaitu kemampuan bekerja sama, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah untuk

mufakat, serta berusaha menyelesaikan masalah bersama demi kepentingan bersama.

- 5) Integritas, yaitu sikap jujur, dapat dipercaya, konsisten antara perkataan dan perbuatan, berani membela kebenaran, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
- 6) Selain lima nilai utama tersebut, karakter peserta didik juga dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, kerja keras, toleransi, sopan santun, serta cinta lingkungan. Nilai-nilai tersebut diharapkan berkembang secara utuh melalui proses pembelajaran, keteladanan, dan pembiasaan yang dilakukan secara konsisten di sekolah (Kemendikbudristek, 2023).

d. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penguatan Karakter

Keberhasilan penguatan karakter dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri peserta didik maupun dari lingkungan sekitarnya (Desmita, 2023).

1) Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama yang berperan dalam membentuk karakter anak melalui pola asuh, keteladanan orang tua, perhatian, kasih sayang, serta pembiasaan nilai-nilai moral sejak dini. Pola asuh yang demokratis dan konsisten menjadi fondasi kuat bagi perkembangan karakter positif anak (Gunawan, 2023).

2) Sekolah

Sekolah menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan formal yang berperan dalam menanamkan karakter melalui pembelajaran yang terintegrasi nilai, budaya sekolah yang positif, tata tertib yang ditegakkan secara adil, kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung, serta keteladanan seluruh warga sekolah (Sumaatmadja, 2022).

3) Guru

Guru memiliki peran yang sangat menentukan sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan teladan dalam membentuk karakter peserta didik. Sikap, tutur kata, dan perilaku sehari-hari guru akan menjadi contoh yang mudah ditiru oleh peserta didik, sehingga konsistensi guru sangat diperlukan (Suprijanto, 2025).

4) Teman sebaya

Interaksi dengan teman sebaya dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan karakter peserta didik. Lingkungan pergaulan yang mendukung nilai kebaikan akan memperkuat karakter positif, sebaliknya pergaulan yang tidak sehat dapat menggeser nilai yang telah ditanamkan di sekolah dan rumah (Rohman dkk., 2024).

5) Lingkungan masyarakat

Nilai, norma, budaya, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat turut memengaruhi pembentukan karakter peserta didik melalui interaksi sosial yang terjadi di luar lingkungan sekolah.

Keselarasan nilai antara lingkungan masyarakat dengan sekolah dan keluarga akan mempercepat internalisasi karakter (Suryadi, 2023).

6) Media dan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran, namun juga berpotensi memengaruhi karakter peserta didik apabila tidak digunakan secara bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan serta pendidikan literasi digital agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan menyaring informasi yang masuk (Widodo & Juwita, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan karakter merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama yang sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, penguatan karakter dipandang sebagai hasil dari implementasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), sehingga peserta didik diharapkan memiliki karakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Latif dkk., 2025).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Zulyan, (2024) dengan judul “Peran Guru PKn Dalam Penanaman Nilai Moral Pada Siswa Kelas X Di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2023/2024”. Hasil penelitian

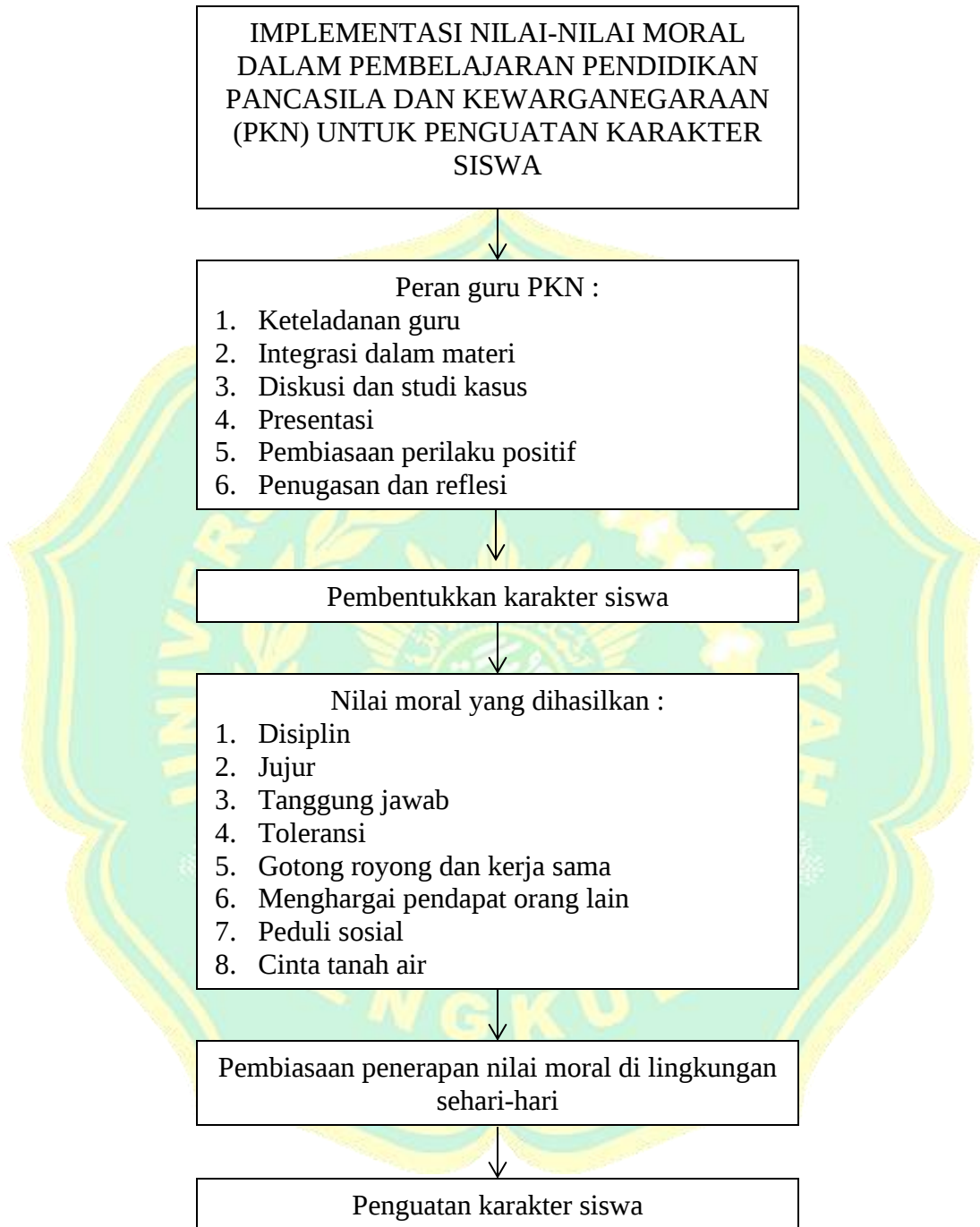
tersebut menyatakan bahwa: guru PKn berperan penting dalam penanaman nilai moral melalui keteladanan, pembiasaan berbuat jujur, penanaman tanggung jawab, penegakan disiplin, serta pembinaan religius seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Temuan ini memperkuat bahwa peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai model moral bagi siswa. Penelitian tersebut juga menemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, rendahnya keterlibatan orang tua karena kesibukan, pengaruh lingkungan yang tidak mendukung, serta paparan media massa yang menampilkan konten kurang sesuai dengan nilai moral. Adapun solusi yang diterapkan guru PKn meliputi perancangan program pembinaan yang efektif meski waktu terbatas, peningkatan komunikasi dengan orang tua, pelibatan siswa dalam kegiatan lingkungan, serta edukasi literasi media agar siswa mampu memilih konten positif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sugara & Mutmainnah, (2021) dengan judul “Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pembelajaran PKn Menghadapi Digitalisasi 4.0”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa: digitalisasi 4.0 membuat informasi menjadi semakin mudah dan cepat. Sesuatu yang hari ini terjadi di Eropa atau Amerika dalam hitungan detik dapat diterima di Indonesia. Begitu cepatnya sehingga kesempatan untuk menentukan informasi tersebut benar atau salah menjadi semakin cepat. Siswa yang tidak dibentengi dengan karakter yang kuat akan mudah sekali terpengaruh dan tidak tertutup kemungkinan akan mempengaruhi tindakannya. Walaupun PKn adalah mata pelajaran yang tepat untuk

menguatkan karakter siswa, strategi yang tepat harus diambil agar materi dapat ditangkap dengan jelas oleh siswa-siswi. Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang digunakan mulai dari analisa kebutuhan siswa -siswa, metode pembelajaran yang tepat, kegiatan penutup yang bermakna serta evaluasi dari per pertemuan berdampak efektif dalam menguatkan karakter siswa dalam menghadapi digitalisasi 4.0.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syakur et al., (2025) dengan judul “Strategi Penanaman Karakter Tanggung Jawab Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sma Arrohmaniyah Tambelangan, Sampang”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa: Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah, khususnya dalam mata pelajaran seperti Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sangat penting untuk memelihara warga negara yang bertanggung jawab. Temuan dari penelitian menggarisbawahi perlunya menggunakan metode pengajaran yang beragam untuk mengakomodasi berbagai sikap dan perilaku siswa. Strategi yang efektif seperti pengajaran dan pembelajaran kontekstual (CTL) tidak hanya meningkatkan relevansi pelajaran tetapi juga mendorong siswa untuk merefleksikan tanggung jawab mereka dalam situasi kehidupan nyata.

C. Rangkuman Kajian Pustaka



Gambar 2.1 Rangkuman Kajian Pustaka